

ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN PIUTANG NEGARA TAK TERTAGIH PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA

Vika Nur Hanifah¹⁾, Andi Asrihapsari²⁾

^{1,2} Program Studi Diploma III Akuntansi Sekolah Vokasi,
Universitas Sebelas Maret Surakarta
E-mail: andiasrihapsari@staff.uns.ac.id

Abstract

The Surakarta State Wealth and Auction Service Office (KPKNL) is a vertical agency of the Directorate General of State Wealth (DJKN) which is under and directly responsible to the head of the regional office. The purpose of this study is to determine the management process, performance, as well as constraints and efforts in managing bad state receivables at the Surakarta KPKNL. The method used in this study is a combined method, namely with qualitative descriptive analysis and quantitative descriptive analysis. The data collection technique is carried out by field observation, interviews, related documents, literature studies and data obtained in the form of primary data and secondary data. The results of this study explain that the procedure for managing state receivables is in accordance with applicable regulations. The performance of state management at the Surakarta KPKNL is considered very effective because it shows a value above 100%. There are obstacles faced when managing bad state receivables and efforts made by the KPKNL Surakarta. One of the suggestions from the author in reducing the amount of bad debts is to store files properly and make data backups, so as to expedite the process of managing bad state receivables.

Keywords : Management of State Receivables, Uncollectible Receivables, KPKNL

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu indikator untuk menciptakan pemerintahan yang baik yaitu terwujudnya pengelolaan Keuangan Negara yang baik pula karena aspek keuangan merupakan titik pangkal dari segala kegiatan yang kemudian akan dijalankan oleh pemerintah (Widayati, 2014). Dalam mengatur keuangan negara, Kementerian Keuangan mendirikan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara memiliki tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis, salah satunya di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang (Polii, et al, 2021). Salah satu aspek utama dari pengelolaan keuangan negara adalah penyelesaian Piutang Negara, yang mana memerlukan perhatian khusus agar dapat terselenggara secara efektif dalam rangka

peningkatan perekonomian nasional (Kurniawan, 2021).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara Pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara Dan Pengurusan Sederhana Oleh Panitia Urusan Piutang Negara, menyebutkan bahwa Piutang Negara yang merupakan hak pemerintah perlu dikelola secara optimal melalui pengembangan sistem pengelolaan Piutang Negara yang handal dan terpercaya oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Piutang Negara ialah besarnya utang seseorang ataupun lembaga yang wajib dibayarkan kepada negara ataupun kepada pemerintah daerah (Kasmoni dan Rachmatullaily, 2016). Piutang yang tidak bisa dibayarkan oleh penanggung utang akan menjadi piutang tak tertagih.

Piutang Negara tak tertagih merupakan piutang yang telah dioptimalkan

penyelesaiannya namun tidak dapat dibayar debitur sampai jatuh tempo yang ditetapkan (Zakiy, 2022). Jika terjadi piutang macet biasanya ada yang diselesaikan secara intern oleh instansi terkait dengan pihak penerima debitur, tetapi kalau ternyata piutang tersebut tetap tidak dapat diselesaikan secara intern, maka piutang tersebut dikategorikan sebagai piutang Negara yang macet, maka pengaturannya diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (untuk selanjutnya disebut PUPN) (Ayunani, 2018).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020, Piutang Negara secara khusus diurus oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang mana merupakan panitia yang bersifat interdepartemental. Organisasi ini dibentuk untuk mengurus atau menangani masalah yang terjadi dalam piutang negara. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) adalah satuan kerja yang menjalankan/melaksanakan keputusan dari Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dalam hal pengurusan piutang negara. Tujuan dari KPKNL c.q PUPN untuk mengurus piutang negara yang berasal dari instansi pemerintah. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) menindak lanjuti urusan piutang negara yang macet (Wuwungan dan Rawis, 2018).

Dalam pelaksanaan penagihan piutang, Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta tentunya seringkali mengalami kendala. Adanya kendala dalam pengurusan kasus-kasus piutang tak tertagih, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta memiliki tugas untuk mengelola dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan kasus piutang tak tertagih. Untuk mengetahui apakah pengelolaan KPKNL Surakarta atas piutang tak tertagih sudah berjalan dengan baik atau belum, perlu adanya pengukuran tingkat efektivitas. Dalam sebuah kegiatan atau program terdapat ukuran efektivitas di dalamnya, konsep efektivitas sangat penting

untuk dilakukan. Konsep efektivitas menekankan pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Rosalina, 2014). Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai. Untuk mengetahui tingkat keefektifan dalam pengelolaan penyelesaian piutang negara oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta, diperlukan adanya pengukuran efektivitas.

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi bagi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta khususnya pada Divisi Piutang Negara untuk meningkatkan kinerja dalam mengurus piutang negara. Serta belum ada penelitian mengenai pengukuran kinerja pengelolaan piutang negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta.

1.2 Tinjauan Pustaka

1) Keuangan Negara

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, keuangan negara didefinisikan sebagai: semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara. berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Pasal 1 butir 1). Tahapan pengelolaan keuangan terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan (Amtiran dan Molidya, 2020).

2) Piutang Negara

Piutang merupakan salah satu jenis transaksi akuntansi yang mengurus penagihan konsumen yang berhutang pada seseorang, suatu perusahaan, atau suatu organisasi untuk barang dan layanan yang telah diberikan pada konsumen tersebut. Piutang ialah hak menagih seseorang ataupun perusahaan baik berupa uang ataupun barang kepada pihak terutang dikarena adanya transaksi uang atau barang secara kredit (Hadi dan Budi, 2020). Piutang merupakan besarnya utang

seseorang ataupun lembaga yang mana harus dibayar kepada yang memberikan utang (Kasmoni dan Rachmatullaily, 2016).

Piutang Negara sendiri mempunyai beberapa definisi menurut peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara dan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara, menyebutkan bahwa Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 Pasal 8 tentang Panitia Pengurusan Piutang Negara menyebutkan bahwa piutang negara atau utang kepada negara yaitu jumlah uang yang wajib di bayar secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun.

Piutang Negara tak tertagih merupakan piutang macet yang diserahkan pengaturannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dalam rangka penyelesaian piutang Negara yang telah ditetapkan sebagai Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT). Piutang Negara yang ditetapkan sebagai Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih Jika masih terdapat sisa piutang namun penanggung utang tidak ditemukan keberadaannya dan/atau tidak memiliki kemampuan untuk membayar serta Barang jaminan tidak ada, telah terjual, ditebus, atau tidak lagi mempunyai nilai ekonomis (Zakiy, 2020).

3) Pengukuran Kinerja Pengelolaan Piutang Negara Tak Tertagih

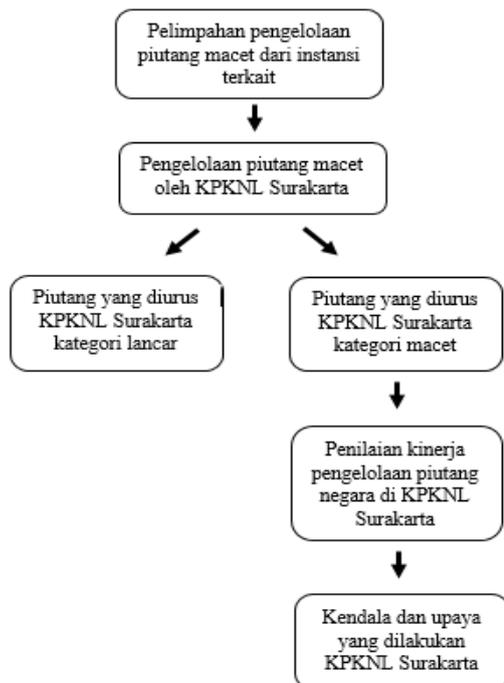
Pengukuran kinerja merupakan tindakan pengukuran yang dilaksanakan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada perusahaan. Hasil dari pengukuran tersebut kemudian akan digunakan sebagai umpan balik dalam bentuk tindakan yang efektif dan akan

menyuguhkan informasi terkait prestasi pelaksanaan suatu rencana dan titik dimana perusahaan memerlukan penyesuaian-penyesuaian atas aktivitas perencanaan dan pengendalian (Riadi, 2020). Pengukuran kinerja bertujuan guna memotivasi karyawan agar bisa mencapai sasaran organisasi dan mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar menghasilkan tindakan yang diinginkan oleh organisasi (Riadi, 2020). Salah satu cara untuk mengukur kinerja yaitu dengan rasio efektivitas.

4) Sistem Informasi Akuntansi (SIA)

Menurut James A Hall (2007, 9): Sistem Informasi ialah serangkaian prosedur formal yang mana data dikumpulkan, diproses menjadi informasi dan didistribusikan kepada para pengguna. Ada pula yang mengasumsikan bahwa sistem informasi akuntansi merupakan sebuah sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan juga memproses data menjadi informasi yang berguna dalam mendukung proses pengambilan keputusan (J.K, et al, 2019).

5) Kerangka Pemikiran



Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) Mengetahui pengelolaan piutang negara

tak tertagih yang dilakukan oleh KPKNL Surakarta. (2) Mengetahui kinerja KPKNL Surakarta dalam melakukan pengelolaan piutang negara tak tertagih. (3) Mengetahui kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan saat melakukan pengelolaan piutang negara tak tertagih oleh KPKNL Surakarta.

2. METODE PENELITIAN

Analisis data dan pembahasan pada sub bab ini, akan membahas terkait dengan bagaimana pengelolaan piutang negara tak tertagih pada KPKNL Surakarta, pengukuran kinerja pengelolaan piutang negara tak tertagih pada KPKNL Surakarta, serta kendala yang dihadapi dan upaya yang telah dilakukan KPKNL Surakarta. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode gabungan, yaitu dengan analisis deskriptif kualitatif dan analisis deskriptif kuantitatif.

Data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer menurut Danang Sunyoto (2013:21) yaitu data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti yang mana dalam penelitian ini data primer berasal dari hasil observasi, survei, dan wawancara langsung dengan pihak yang kompeten, yaitu Seksi Piutang Negara KPKNL Surakarta. Menurut Danang Sunyoto (2013:21) juga, data sekunder yaitu data berupa berkas yang diurus, peraturan, prosedur yang terkait dan dimiliki pihak KPKNL Surakarta pada Divisi Piutang Negara. Data sekunder yang penulis gunakan yaitu Laporan Indikator Kinerja Utama Piutang Negara (IKU PN) KPKNL Surakarta. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengelolaan Piutang Negara Tak Tertagih yang Dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta

1) Prosedur Pengelolaan Piutang Negara Tak Tertagih pada KPKNL Surakarta.

Prosedur yang dilakukan oleh KPKNL Surakarta dalam menyelesaikan kasus piutang negara menurut PMK 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara yaitu sebagai berikut : (1) Penyerahan Piutang Negara. (2) Penerimaan dan Penolakan Pengurusan Piutang Negara. (3) Panggilan Kepada Penanggung Utang. (4) Pernyataan Bersama (PB) / Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN). (5) Penerbitan Surat Paksa. (6) Penyitaan/ (7) Penjualan Barang. (8) Penetapan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).

Pelaksanaan pengelolaan piutang negara ada petugas yang terlibat dalam pengurusannya. Petugas yang terlibat dalam melaksanakan proses pengurusan piutang negara tersebut yaitu pemegang BKPN, Jurusita, dan Pemeriksa Piutang Negara

Pengelolaan Piutang Negara Tak tertagih tentunya memiliki dokumen terkait, yaitu: (1) Resume Hasil Penelitian Kasus (RHPK). (2) Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N). (3) Surat Panggilan (SP). (4) Surat Panggilan Terakhir. (5) Surat Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN). (6) Surat Paksa (SP). (7) Surat Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT). (8) Surat Pemberitahuan *Crash Program*. (9) Surat Perintah Penyitaan. (10) Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS).

2) Fungsi Terkait dalam Pengelolaan Piutang Negara Tak Tertagih pada KPKNL Surakarta.

Dalam melakukan pengelolaan piutang negara ada petugas yang terlibat dalam pengurusannya. Petugas yang terlibat dalam melaksanakan proses pengurusan piutang negara tersebut

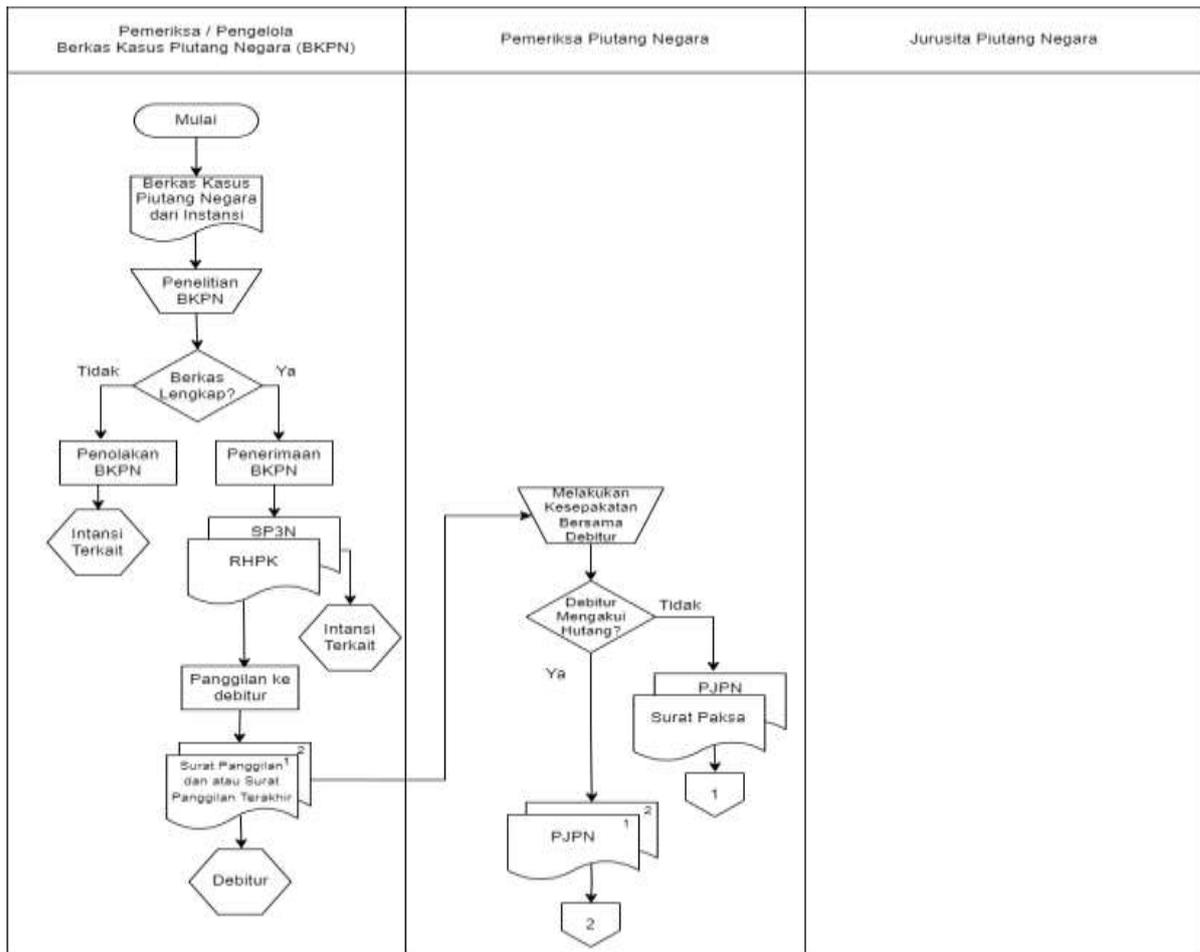
yaitu pemegang BKNP, Jurusita, dan Pemeriksa Piutang Negara.

- 3) Dokumen Terkait Pengelolaan Piutang Negara Tak Tertagih pada KPKNL Surakarta.

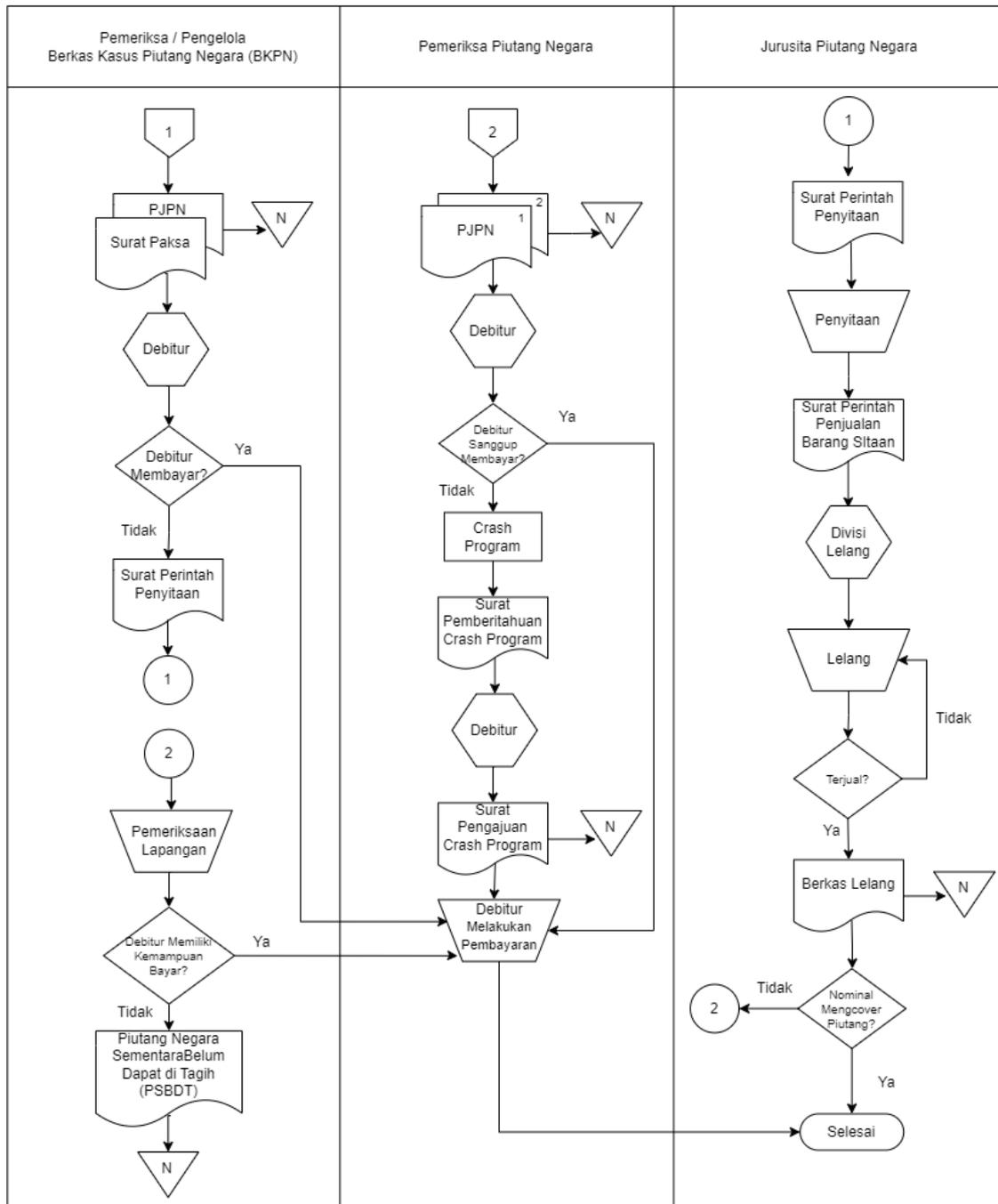
Dalam melakukan tugas-tugas pengelolaan piutang negara KPKNL Surakarta tidak selalu berjalan dengan baik. Adapun kendala-kendala yang harus dihadapi oleh KPKNL Surakarta untuk melaksanakan pengelolaan piutang negara. Beberapa kendala yang dihadapi KPKNL Surakarta dan solusi yang dilakukan dalam pengelolaan piutang negara yaitu: (1) Resume Hasil Penelitian Kasus (RHPK). (2) Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N). (3) Surat Panggilan (SP). (4) Surat Panggilan Terakhir. (5) Surat Penetapan Jumlah Piutang

Negara (PJPN). (6) Surat Paksa (SP). (7) Surat Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT). (8) Surat Pemberitahuan *Crash Program*. (9) Surat Perintah Penyitaan. (10) Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS).

Flowchart merupakan sebuah diagram yang memaparkan sebuah alur proses dari sebuah program (Setiawan, 2021). Dalam *flowchart* digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah untuk setiap langkahnya. Flowchat merupakan salah satu jenis teknik dokumentasi Sistem Informasi. Berikut merupakan *System Flowchart* Pengelolaan Piutang Negara pada KPKNL Surakarta:



Gambar 3.1 *System Flowchart* Prosedur Pengurusan Piutang Negara pada KPKNL Surakarta Bagian 1.



Gambar 3.2 *System Flowcart* Prosedur Pengurusan Piutang Negara pada KPKNL Surakarta Bagian 2.

3.2 Kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta dalam Melakukan Pengelolaan Piutang Negara Tak Tertagih

Agar dapat menilai bagaimana pengelolaan piutang negara oleh KPKNL Surakarta sudah berjalan

dengan baik atau belum berjalan dengan baik, perlu adanya sebuah pengukuran efektivitas. Dalam penelitian ini untuk mengetahui seberapa tingkat efektivitas pengelolaan piutang negara dihitung dengan menggunakan rasio efektivitas. Rasio efektivitas pengelolaan piutang negara diperoleh dengan membandingkan total realisasi dengan total target capaian kinerja yang di

peroleh pada Laporan Indikator Kinerja Utama (IKU) Piutang Negara. Indikator Kerja Utama (IKU) yang dilakukan oleh bidang Piutang Negara KPKNL Surakarta, yaitu Penurunan Outstanding Piutang Negara, Penerimaan Negara dari PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Piutang Negara, Penyelesaian Efektivitas BKPN (Berkas Kasus Piutang Negara), dan Penyelesaian Crash Program Keringanan Piutang Negara. Sehingga berikut perhitungan rasio efektivitas:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi IKU}}{\text{Target IKU}}$$

Pada Laporan Indikator Kinerja Utama (IKU) Piutang Negara. Indikator Kerja Utama (IKU) yang dilakukan oleh bidang Piutang Negara KPKNL Surakarta, dijelaskan bahwa pada tahun 2020 dan 2021, untuk target Penurunan Outstanding Piutang Negara yaitu sebesar Rp64.000.000 dan realisasinya lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp121.647.420. untuk target Penerimaan Negara dari PNB Piutang

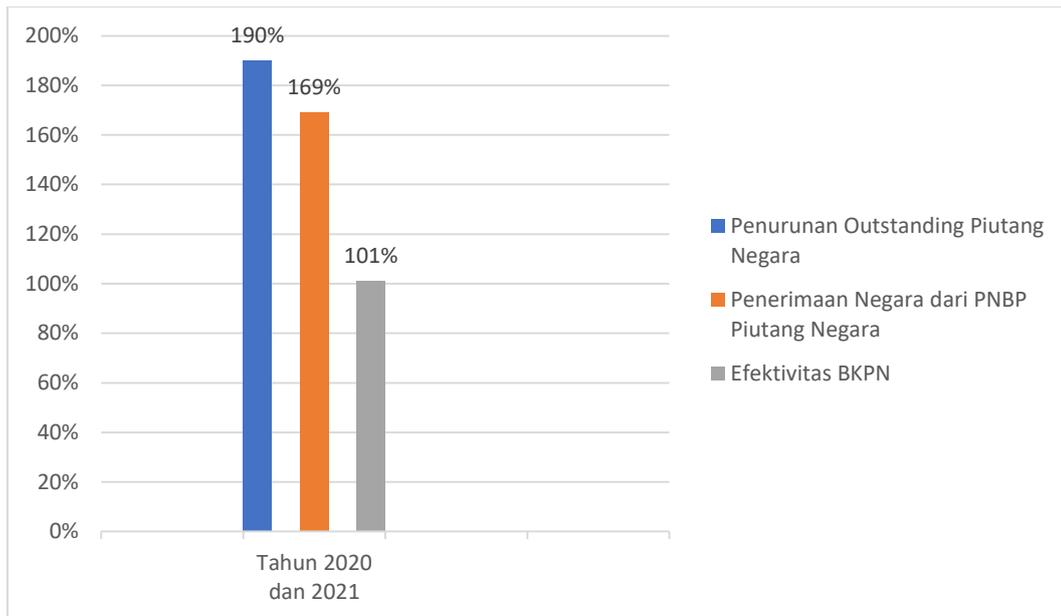
Negara yaitu sebesar Rp900.000.000 dan realisasinya lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp1.519.797.356. Untuk target Efektivitas BKPN yaitu sebesar 349 dan realisasinya lebih tinggi dari target yaitu sebesar 351.

Sedangkan pada tahun 2022, untuk target Penurunan Outstanding Piutang Negara yaitu sebesar Rp5.131.000.000 dan realisasinya lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp6.554.521.438. untuk target Penerimaan Negara dari PNB Piutang Negara yaitu sebesar Rp207.000.000 dan realisasinya lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp249.501.765. Untuk target Efektivitas BKPN yaitu sebesar 240 dan realisasinya lebih tinggi dari target yaitu sebesar 258. Untuk target Penyelesaian Crash Program Keringanan Piutang Negara yaitu sebesar 33 dan realisasinya lebih tinggi dari target yaitu sebesar 38.

Berdasarkan perhitungan rasio efektivitas di atas, berikut adalah tabel hasil perhitungan rasio efektivitas pada tahun 2020 dan 2021 serta tahun 2022, sebagai berikut :

Tabel 3.1 Rasio Efektivitas Pengelolaan Piutang Negara KPKNL Surakarta tahun 2020 dan 2021

| Indikator Kinerja Utama | Taget | Realisasi | Raiso | kriteria |
|---|---------------|-----------------|-------|----------------|
| Penurunan Outstanding Piutang Negara | Rp64.000.000 | Rp121.647.420 | 190% | Sangat Efektif |
| Penerimaan Negara dari PNB Piutang Negara | Rp900.000.000 | Rp1.519.797.356 | 169% | Sangat Efektif |
| Efektivitas BKPN | 349 | 351 | 101% | Sangat Efektif |



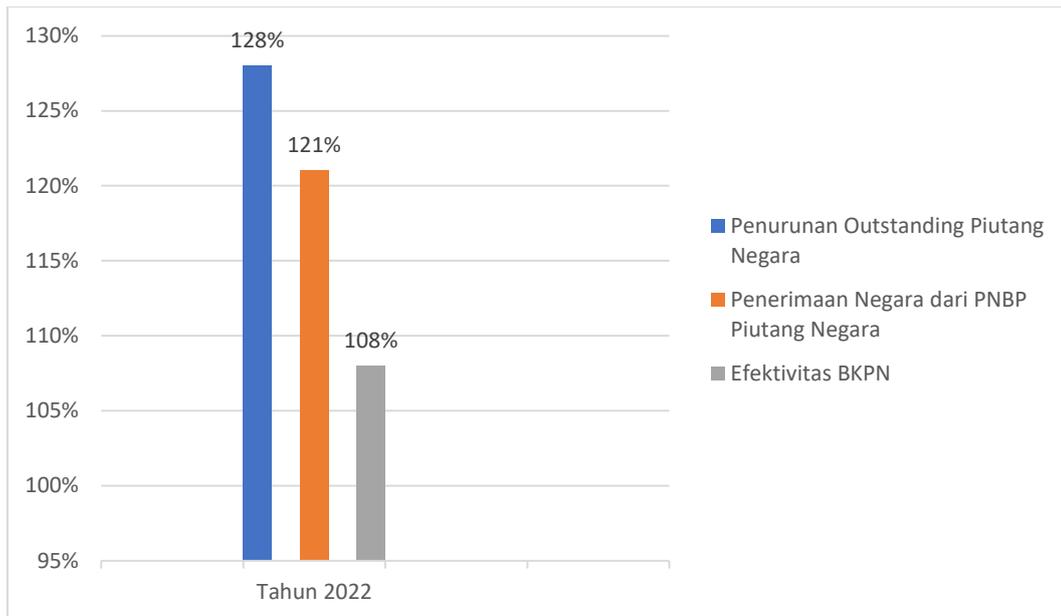
Gambar 3.3 Gambar Grafik Indikator Kinerja Utama KPKNL Surakarta Tahun 2020 dan 2021

Berdasarkan pada data hasil pengukuran rasio pengelolaan Piutang Negara KPKNL Surakarta pada tahun 2020 dan 2021 memiliki rata-rata sebesar 153%, sehingga dapat dikatakan bahwa kriteria pengelolaan piutang negara oleh KPKNL Surakarta “Sangat Efektif” karena menunjukkan

angkat diatas 100%. Pengukuran nilai efektivitas tahun 2020 dan 2021 digabung dikarenakan dari laporan divisi Piutang Negara hanya memberikan data seperti diatas. Sedangkan perhitungan rasio efektivitas pada tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Rasio Efektivitas Pengelolaan Piutang Negara KPKNL Surakarta tahun 2022

| Indikator Kinerja Utama | Taget | Realisasi | Raiso | kriteria |
|--|----------------|-----------------|-------|----------------|
| Penurunan Outstanding Piutang Negara | Rp5.131.000000 | Rp6.554.521.438 | 128% | Sangat Efektif |
| Penerimaan Negara dari PNBP Piutang Negara | Rp207.000.000 | Rp249.501.765 | 121% | Sangat Efektif |
| Efektivitas BKPN | 240 | 258 | 108% | Sangat Efektif |
| Crash Program Keringanan Piutang Negara | 33 | 38 | 115% | Sangat Efektif |



Gambar 3.4 Gambar Grafik Indikator Kinerja Utama KPKNL.

Berdasarkan pada data hasil pengukuran rasio pengelolaan Piutang Negara KPKNL Surakarta pada tahun 2022 juga memiliki rata-rata sebesar 118% sehingga dapat dikatakan bahwa kriteria pengelolaan piutang negara oleh KPKNL Surakarta “Sangat Efektif” karena menunjukkan angkatan di atas 100%.

Dari perhitungan rasio efektivitas pengelolaan piutang negara pada tahun 2020 & 2021 dan 2022 menunjukkan rata-rata rasio di atas 100%, sehingga bisa dikatakan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan piutang KPKNL Surakarta dinyatakan “Sangat Efektif”.

3.3 Mengetahui Kendala yang Dihadapi dan Upaya yang Dilakukan saat Melakukan Pengelolaan Piutang Negara Tak Tertagih oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta

Dalam melakukan tugas-tugas pengelolaan piutang negara KPKNL Surakarta tidak selalu berjalan dengan baik. Adapun kendala-kendala yang harus dihadapi oleh KPKNL Surakarta untuk melaksanakan pengelolaan piutang negara. Beberapa kendala yang

dihadapi KPKNL Surakarta dan solusi yang dilakukan dalam pengelolaan piutang negara yaitu:

- 1) Debitur tidak memiliki kemampuan bayar. Solusi yang dilakukan oleh KPKNL Surakarta yaitu: (1) Restruktur Hutang, (2) Crash Program Keringanan Hutang, (3) Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).
- 2) Debitur pindah lokasi tempat tinggal. Solusi yang dilakukan oleh KPKNL Surakarta yaitu: (1) Jika tempat tinggal debitur masih lingkup wilayah kewenangan KPKNL Surakarta, maka KPKNL Surakarta harus tetap menagih kepada debitur, jika diperlukan KPKNL Surakarta mengunjungi tempat tinggal debitur guna menagih hutang tersebut. (2) Jika tempat tinggal debitur berada di luar lingkup KPKNL Surakarta, maka untuk melakukan survei ke lapangan KPKNL Surakarta meminta bantuan kepada KPKNL yang melingkupi daerah tempat tinggal debitur tersebut. Tetapi untuk pengurusan piutangnya sendiri tetap dilakukan oleh KPKNL Surakarta. (3) Dalam kasus ini, jika KPKNL Surakarta tidak dapat menemukan

keberadaan debitur maka akan dilakukan PSBDT. Jika beberapa waktu alamat debitur dapat ditemukan, maka akan tetap dilakukan penagihan seperti yang di jelaskan pada poin 1) dan 2) di atas.

- 3) Debitur meninggal dunia. Solusi yang dilakukan oleh KPKNL Surakarta yaitu: (1) Jika diketahui debitur memiliki ahli waris, maka hutang yang ditanggung oleh debitur akan di alihkan penanggung hutangnya kepada ahli waris tersebut. (2) Jika debitur yang meninggal dunia tidak memiliki ahli waris atau tidak diketahui ahli warisnya, maka akan di lakukan PSBDT.
- 4) Debitur tidak mengakui adanya hutang. Solusi yang dilakukan oleh KPKNL Surakarta yaitu: Jika saat KPKNL memberitahukan atas tanggungan hutang yang dimiliki oleh debitur, tetapi debitur tidak mengakui adanya hutang tersebut maka debitur wajib memberikan bukti yang konkrit. Jika debitur tidak dapat membuktikan tidak adanya hutang, maka debitur wajib membayar dan pihak KPKNL Surakarta akan tetap menagih kewajiban hutang tersebut dengan cara mengirimkan surat. Jika peringatan surat tidak mau membayar atau tidak direspon maka pihak KPKNL Surakarta akan mengirimkan pesan atau telepon kepada debitur. Jika debitur masih tetap mengabaikan, maka pihak KPKNL Surakarta akan melakukan kunjungan ke alamat debitur yang sudah tertera pada data yang diberikan

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dan pembahasan mengenai pengelolaan piutang tak tertagih pada KPKNL Surakarta, maka dapat diambil beberapa

kesimpulan yang secara singkat sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan Piutang negara Tak Tertagih pada KPKNL Surakarta meliputi: Penyerahan Piutang, Penerimaan dan Penolakan Pengurusan Piutang Negara, Panggilan Kepada Penanggung Utang, Pernyataan Bersama/Penetapan Jumlah Piutang, Penerbitan Surat Paksa, Penyitaan, Penjualan Barrang, Penetapan Piutang Nefara Sementara Belum Dapat Ditagih.
- 2) Hasil dari pengukuran kinerja Pengelolaan Piutang Negara Tak Tertagih pada KPKNL Surakarta dinilai sudah sangat efektif. Dilihat dari pengukuran rasioefektivitas pada tahun 2020 dan 2021 mencapai 153% dan pada tahun 2022 mencapai 118%.
- 3) Hambatan yang dihadapi dan solusi yang di lakukan oleh KPKNL Surakarta dalam melakukan Pengelolaan Piutang Negara Tak Tertagih yaitu:
 - a. Debitur Tidak Memiliki Kemampuan Bayar, maka: (1) Restruktur Hutang; (2) Crash Program Keringanan Hutang; (3) Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).
 - b. Debitur Pindah Lokasi Tempat Tinggal, maka: (1) Jika tempat tinggal debitur ditemukan, tetapi masih lingkup KPKNL Surakarta maka akan dilakukan kunjungan debitur dan menagih utangnya; (2) Jika tempat tinggal debitur ditemukan, tetapi di luar lingkup KPKNL Surakarta maka akan berkoordinasi dengan KPKNL wilayah lain tersebut untuk dilakukannya penagihan; (3) Jika tempat tinggal debitur tidak dapat ditemukan maka akan di lakukan PSBDT.
 - c. Debitur Meninggal Dunia, maka: (1) Jika memiliki ahli waris

maka akan dialihkan kepada ahli warisnya; (2) Jika tidak memiliki ahli waris maka adakan di lakukan PSBDT.

- d. Debitur Tidak Mengakui Adanya Hutang, maka debitur harus menyuguhkan bukti yang konkrit jika piutang sudah lunas. Jika debitur tidak bisa memberikan bukti, maka akan tetap dilakukan penagihan sesuai hukum yang berlaku.

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyadari dalam menyusun tugas akhir ini banyak mendapatkan dukungan, bimbingan, bantuan, dan kemudahan dari berbagai pihak sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan. Dengan ketulusan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT untuk segala rahmat-Nya dan memberikan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
2. Bapak Drs. Santoso Tri Hananto M.Acc., Ak. selaku Dekan Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret Surakarta;
3. Bapak Muhammad Syafiqurrahman S.E., M.M., Ak. selaku Kepala Program Studi Diploma III Akuntansi Universitas Sebelas Maret Surakarta;
4. Seluruh dosen Program Studi Diploma III Akuntansi Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret Surakarta atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan;
5. Bapak Adi Wibowo, S.E., M.M. selaku Kepala KPKNL Surakarta yang telah bersedia menerima penulis untuk melakukan penelitian;
6. Mas Oki Budhi Saputro selaku staf divisi Piutang Negara dan seluruh karyawan KPKNL Surakarta yang selalu membantu dan memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir;

7. Seluruh pihak yang terkait yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun untuk menjadikan karya tulis ini lebih baik. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang membutuhkan.

6. REFERENSI

- Amtiran, P. Y., & Molidya, A. (2020). Pengelolaan Keuangan Negara. *Journal Of Management (SME's)*, 12(2), 203-214. <https://media.neliti.com/media/publications/332919-pengelolaan-keuangan-negara-a7f889a5.pdf>
- Ayunani, R. F. (2018). Analisis Penagihan Piutang Negara Oleh KPKNL Kota Metro. *Jurnal Simplex*, 1(1), 35-39. <https://fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JS/article/view/236>
- Dewi, A. R. 2022. Mengenal PUPN. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15318/Mengenal-PUPN.html> (diakses pada 23 April 2023)
- Fitra, M. A. (2021). Tinjauan Atas Piutang Negara Yang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) Dalam Pelunasan Piutang Negara Di KPKNL Medan. Tugas Akhir, Poloteknik Keuangan Negara STAN, Tangerang Selatan.
- Gultom, A. J., Riyanto, B., & Djais, M. (2016). Penyelesaian Piutang Negara Di Wilayah Hukum Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang. *Diponegoro Law Journal*, 5(2), 1-14. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/11304>

- Hadi, A. K., & Budi, S. (2020). Analisis Pengendalian Piutang Usaha Dalam Meminimalisir Piutang Tak Tertagih. *Jurnal Penelitian Implementasi Akuntansi (JPIA)*, 1(1), 71-87. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JPIA/article/view/8429>
- Ismawati, Naidah, & Razak, L. A. (2020). Audit Kepatuhan Pengelolaan Piutang Dalam Meminimalisir Piutang Tak Tertagih (Studi Kasus PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Makassar. *Jurnal Ilmu Manajemen Profitability*, 4(2), 51-64. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/profitability/article/view/3794>
- Indah, R. N. 2021. Pengurusan dan Pengelolaan Piutang Negara/Daerah. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpk-nl-singawang/baca-artikel/15205/Pengurusan-dan-Pengelolaan-Piutang-NegaraDaerah.html>. (diakses pada 23 April 2023)
- Indrasari, F. C. (2022). Implementasi Penagihan Piutang Pasien Rs. Dr. Kariadi Berdasarkan PMK Nomor 240/PMK.06/2016 Dan SE Nomor 1/KN./2020 Oleh KPKNL Semarang. Tugas Akhir, Poloteknik Keuangan Negara STAN, Tangerang Selatan.
- J.K, A., Nurjanah, Y., & Munawar, A. (2019). Peranan Sistem Informasi Akuntansi Piutang Terhadap Pengendalian Piutang (Studi Kasus Pada Pt. Arwinda Perwira Utama). *Jurnal Ilmu Manajemen Kesatuan*, 7(1), 192-172. <https://jurnal.ibik.ac.id/index.php/jimkes/article/view/209>
- Kasmoni, V. D., & Rachmatullaily. (2016). Prosedur Pengurusan Piutang negara Dan Daerah Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Bogor. *Moneter: Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 4(1), 47-64. <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/MONETER/article/view/961>
- Kurniawan, A. 2021. Peran PUPN dalam Optimalisasi Pengurusan Piutang Negara. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpk-nl-semarang/baca-artikel/14009/Peran-PUPN-dalam-Optimalisasi-Pengurusan-Piutang-Negara.html>. (diakses pada 15 April 2023)
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2021. Sejarah DJKN. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/pag-e/2922/Sejarah-DJKN.html>. (diakses pada 10 Juni Juni 2023)
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2020. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara Pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana Oleh Panitia Urusan Piutang Negara. Menteri Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2023. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/PMK.06/2023 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah Yang Diurus/Dikelola Oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun Anggaran 2023.

- Menteri Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga Dan Bendahara Umum Negara. Menteri Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara. Menteri Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.
- Kristiyanti, LMS, Maya Widyana Dewi. (2021). Analisa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan Serta Pengaruhnya Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2018). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, vol 21, no 2 (2021), 424-431.
- DOI : [10.29040/jap.v21i02.1509](https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1509)
- Listiani, N. M. (2017). Pengaruh Kreativitas dan Motivasi Terhadap Hasil Belajar Mata Pelajaran Produktif Pemasaran Pada Siswa Kelas XI SMKNegeri 2 Tuban. *Moneter: Jurnal Ekonomi Pendidikan dan Keirusahaan*, 22(1), 263-275. <https://doi.org/10.26740/jepk.v2n2.p263-275>
- Mahardita, H. R. (2017). Efektivitas Dan Efisiensi Kerja Aparatur Sipil Negara Di Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur. *eJournal Ilmu Pemerintah*, 5(1), 133-144. [https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/02/Hayuning%20ORizki%20Mahardita%20\(02-10-17-02-37-33\).pdf](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/02/Hayuning%20ORizki%20Mahardita%20(02-10-17-02-37-33).pdf)
- Marsondang, A., Purwanto, B., & Mulyati, H. (2019). Pengukuran Efisiensi Serta Analisis Faktor Internal dan Eksternal Bank yang Memengaruhinya. *Jurnal Manajemen dan Organisasi*, 10(1), 48-62. <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jmo/article/view/28860>
- Miftahurrohman. (2022). Konsep Sistem Informasi Akuntansi. Universitas Sains & Teknologi Komputer. <https://komputerisasi-akuntansi-d3.stekom.ac.id/informasi/baca/Konsep-Sistem-Informasi-Akuntansi/d8f124d8fa70663071bdc80719d44465ac0b2757> (diakses pada 18 Juni 2023)
- Nadifa, H. M. (2017). Analisis Dampak Kelebihan Setoran Pelimpahan Pajak Oleh Bank Ke RKUN Di KPPN Surabaya II. Artikel Ilmiah. <https://eprints.perbanas.ac.id/4239/1/ARTIKEL%20ILMIAH.pdf>. (diakses pada 30 April 2023)
- Pangkey, I., & Pinatik, S. (2015). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(4), 33-43. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/10581>
- Polii, F. P., Pangemanan, S. S., & Lambey, R. (2021). Analisis Sistem Penagihan Piutang Negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(1), 841-850. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/32593>
- Priatna, P. (2016). Pengukuran Kinerja Perusahaan Dengan Rasio Profitabilitas. *AKURAT: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 7(2), 44-53.

- <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/akurat/article/view/103/102>
- Purwiyanti, D. (2017). Analisis Kinerja Berbasis Konsep Value For Money Pada Kegiatan Fisik Pekerjaan Irigasi Donggala Kodi (Study di Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu). *Jurnal Katalogis*, 5(3), 190-200. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/8696/6909>
- Putri, R. P., Jauhari, I., & Rahayu, S. W. (2016). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/puu-ix/2011 dalam Pelaksanaan Penyelesaian Piutang Negara pada Bank Badan Usaha Milik Daerah. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 209-219. <https://www.neliti.com/publications/240374/implikasi-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-77puu-ix2011-dalam-pelaksanaan-penye>
- Pemerintah Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Presiden Republik Indonesia. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2022. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara Oleh Panitia Urusan Piutang Negara. Presiden Republik Indonesia. Jakarta.
- Rondonuwu, R. H., Tinangon, J. J., & Budiarmo, N. (2015). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(4), 001-142. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/10580>
- Rosalina, I. (2014). Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjam Bergulir Di Dsa Mantren Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan. *Publika Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 2(2), 1-9. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/7675>
- <https://www.neliti.com/publications/294218/iptek-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-proses-penyelesaian-piutang-negara-oleh-pu>
- Rahma, A. (2021). Piutang: Pengertian, Ciri-ciri, dan Jenis-jenis Piutang. Diambil kembali dari Inspirasi majoo. <https://majoo.id/solusi/detail/piutang-usaha-1>. (diakses pada 15 Mei 2023)
- Radytia, A. A. (2019). Pengurusan Piutang Negara Khusus. Diambil kembali dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://majoo.id/solusi/detail/piutang-usaha-1>. (diakses pada 15 Mei 2023)
- Riadi, M. (2020). Pengukuran Kinerja (Pengertian, Tujuan, Syarat, Indikator, Model dan Proses). Diambil kembali dari KAJIANPUSTAKA. <https://www.kajianpustaka.com/2020/02/pengukuran-kinerja-pengertian-tujuan-syarat-model-dan-proses.html>. (diakses pada 06 Juni 2023)
- Sofia, I. P. (2018). Modul Sistem Informasi Akuntansi. Tangerang Selatan: Prodi Akuntansi UPJ.
- Tambunan, B. H. (2021). Analisis Faktor-faktor Penyebab Piutang Tak Tertagih Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 20 Deli Tua. *Journal Of Economics and Business*, 2(2), 65-74. <https://jurnal.uhn.ac.id/index.php/ekonomibisnis/article/view/562>
- Thabroni, G. (2022). Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif (Konsep & Contoh). Diambil kembali dari serupa.id. <https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif-kualitatif-konsep-contoh/>. (diakses pada 14 Juni 2023)

- Utami, N. W. (2022). Sistem Informasi Akuntansi: Pengertian, Fungsi, Contoh. <https://www.jurnal.id/id/blog/pengertian-dan-fungsi-sistem-informasi-akuntansi-dalam-perusahaan/>.(diakses pada 18 Juni 2023)
- Widayati, W. (2014). Pengelolaan Keuangan Negara. *Ekonomi Pemerintah*. Universitas Terbuka, 1-49. <http://repository.ut.ac.id/4253/>
- Wijanarko, G. (2019). Tanggung Jawab Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Samarinda Terhadap Penyelesaian Piutang Macet Tanpa Jaminan. *Jurnal Ilmu Hukum*. 5(2). <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/4663/4504>
- Wuwungan, G. T., & Sanchia Darlene Rawis, V. Z. (2018). Iptek Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Penyelesaian Piutang Negara Oleh PUPN Di KPKNL Manado. *Jurnal Iptek Akuntansi Bagi Masyarakat*, 02(02), 52-56.
- Zakiy, M. A. (2021). Tinjauan Atas Pengurusan Piutang Negara/Daerah Tak Tertagih Oleh Panitia Urusan Piutang Negara Di Kota Pontianak Pada Tahun 2020. Tugas Akhir, Poloteknik Keuangan Negara STAN, Tangerang Selatan.